

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PT JMS TAHUN 2017

Oleh:
Perpetua Hilda Rua
5140111284

Laporan Tugas Akhir ini menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan PT JMS tahun 2017. PT JMS adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa pengelolaan parkir. PT JMS dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menggunakan jasa kantor KJA Yudhika Elrifi. Objek penulisan adalah semua proses pelaksanaan kewajiban perpajakan PT JMS yaitu Pajak Penghasilan yang meliputi Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan 29 dan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa PT JMS dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan badan sesuai dengan Undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007. PT JMS kemudian telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dengan melapor SPT Tahunan tersebut pada bulan Desember tahun 2018 sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Sanksi Administrasi, dan Wajib Pajak Badan

IMPLEMENTATION OF TAX OBLIGATION AT PT JMS IN THE YEAR OF 2017

Perpetua Hilda Rua
5140111284

This Final Project Report aims at analyzing the implementation of tax obligations at PT JMS in the year of 2017. PT JMS is a service company engaged in the field of parking management services. PT JMS uses the service of KJA Yudhika Elrifi in carrying out the taxation duty. The object of this research was all the implementation processes of the tax obligation at PT JMS. The implementation processes covered Income Tax Article 25, Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Income Tax 29, and Value Added Tax. The result of this research showed that PT JMS undertook administrative sanctions for the delay in reporting the annual SPT as in the KUP Law Number 28 of 2007. PT JMS underwent the sanctions by reporting the Annual Tax Return in December 2018 as established taxation regulations.

Keywords: Income-tax, Value Added Tax, Administrative Sanction, and Corporate Taxpayers